

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan Ibu Kota Negara sekaligus Kota Terbesar di Indonesia. Kota Jakarta memiliki ciri khasnya yang hanya dimiliki satu-satunya oleh Indonesia dengan memiliki status setingkat provinsi. Sejarah panjang terkait Jakarta sudah dikenal banyak orang, apalagi dengan pergantian namanya. seperti beberapa nama yaitu Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. DKI Jakarta memiliki proses pembentukan sejarah yang panjang dalam membangun kota besar hingga saat ini. Wilayah Jakarta yang juga disebut sebagai kota metropolitan, dimana terdiri dari beberapa wilayah di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang disingkat dengan sebutan Jabodetabek.

Luasnya wilayah Jakarta membuat banyak penduduk dari luar daerah yang menaruh harapan hidupnya disini. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab semua pusat bisnis maupun politik serta kebudayaan berada di kota ini. Pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sangat terasa manfaatnya hingga saat ini. Perkembangan kota DKI Jakarta ini, tidak terlepas dari seorang pemimpin daerah yakni seorang gubernur dalam menjalankan amanahnya. Selama 10 tahun terakhir, sudah 4 pergantian gubernur DKI Jakarta yakni Joko Widodo (2012-2014); Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017); Djarot Saiful Hidayat (2017); dan Anies Baswedan (2017-2022). Tiga dari pemimpin tersebut memiliki rentang waktu yang lebih lama yakni biasa disebut dengan Jokowi, Ahok dan Anies.

Pada masing-masing masa kepemimpinan tersebut memiliki situasi serta kebijakan yang berbeda dalam pembangunan kota Jakarta. Menurut Nirwono Yoga selaku Pengamat Kota Universitas Trisakti, pembangunan pada masa kepemimpinan Jokowi yaitu peremajaan Taman Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, melakukan terobosan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), dan menggarap banyak transportasi terpadu. Pada masa kepemimpinan Ahok, adanya reformasi birokrasi terhadap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) DKI Jakarta. Selain itu Ahok melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dan

melakukan pemindahan (relokasi) warga Kampung Pulo serta Bukit Duri, menata Kawasan Kalijodo dan Kampung Akuarium di Pasar Ikan (Sari, 2017).

Selain itu adanya kebijakan 3 in 1 dengan ganjil-genap sepeda motor serta pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Sedangkan Djarot lebih banyak melakukan penyelesaian proyek terusan dari Ahok, seperti peresmian RPTRA, Koridor 13 Transjakarta dan Simpang Susun Semanggi (Sari, 2017). Masa kepemimpinan Anies Baswedan, terdapat pembangunan JIEC (Jakarta International E-Prix Circuit), JIS (Jakarta International Stadium), Revitalisasi Kota Tua, Jalur Sepeda, JPO Pinisi, Aplikasi Jakarta Kini (JAKI), JakLingko hingga pelebaran trotoar (Putri, 2022). Namun dari semua pembangunan Jakarta, menurut Nirwono Yoga ketiga kepemimpinan ini memiliki permasalahan yang sama dan belum tuntas dalam masa kepemimpinan yaitu program penanggulangan banjir (Sari, 2017b).

Banjir memang kerap kali dijadikan bahan politisasi para calon pemimpin di DKI Jakarta. Menurut Gun Gun Heryanto, banjir telah lama jadi komoditas politik seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2012 dan berlanjut pada Pilkada tahun 2017 (pinterpolitik.com, 2017). Kenyataannya menghubungkan-hubungkan banjir dan politik hanya akan mencetuskan hal-hal yang menyelewengkan fakta banjir itu sendiri dan dapat mengganggu usaha penanganan yang harus dijalankan. Menurut Heri Andreas selaku Kepala Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB, terkait banjir sebenarnya masyarakat harus meletakkan curah hujan sebagai *given*, yang berarti perlu menerima apa adanya walaupun adanya sedikit rekayasa cuaca. Menurutnya, pada kurun waktu beberapa tahun terakhir di Jakarta tidak ada upaya yang berarti dalam optimalisasi daya tampung air. Normalisasi sungai terhenti demi janji politik, naturalisasi hanya sebuah rencana. Beliau mengharapkan banjir di Jakarta dapat berhenti setelah Anies Baswedan turun jabatan. Harapan ini untuk terwujudnya cara penanganan banjir yang lebih baik. Jika banjir dipolitisasikan secara berkesinambungan, dipastikan banjir akan selalu terjadi di Kota Jakarta (Agus Dwi, 2022).

Penilaian menurut Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja), terdapat sembilan masalah krusial serta mendesak yang segera dituntaskan. Berdasarkan penilaian Kopaja, masalah tersebut diantaranya : (1) kualitas udara Jakarta yang buruk berada diatas baku mutu udara ambien nasional; (2) susah nya akses air bersih di Jakarta; (3) banjir; (4) kurang maksimal nya Pemprov DKI dalam perluasan akses terkait bantuan hukum; (5) rendahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta; (6) tempat hunian yang layak; (7) penggusuran paksa masih terjadi di Jakarta; (8) penanganan Covid-19 dan dampak sosial yang masih belum teratasi; dan (9) ketidakseriusan Pemprov DKI dalam perlindungan para penyandang disabilitas (Naufal, 2022).

Dengan sembilan masalah krusial tersebut Kopaja menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta belum menuntaskan janji kampanye pada saat menjadi calon pemimpin. Semakin lama kondisi penduduk Jakarta setiap tahunnya akan terus mengalami kenaikan, tidak heran bahwa nantinya akan muncul permasalahan baru perkotaan. Seperti tempat tinggal yang layak untuk para pendatang, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal dari sembilan permasalahan yang disebutkan diatas, ada salah satu permasalahan yang dari dahulu masih belum terselesaikan dengan baik yakni banjir. Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta sudah menjadi ciri khas tersendiri bahkan dapat dikatakan langganan. Jakarta yang berada di antara hulu sungai dan pesisir menyebabkan permasalahan banjir yang tak pernah usai. Penyebab banjir di Jakarta ada tiga yakni banjir hujan lokal, banjir kiriman dari wilayah lain, dan banjir rob yang terjadi di pesisir pantai. Hal ini yang menjadi salah satu tugas seorang pemimpin untuk menyelesaikannya berbagai permasalahan. Namun dari masa ke masa pergantian pemimpin di Jakarta terutama pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan persoalan banjir masih belum maksimal dalam penanganannya.

Hal ini yang menjadi salah satu tugas seorang pemimpin untuk menyelesaikannya berbagai permasalahan. Namun dari masa ke masa pergantian pemimpin di Jakarta terutama pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan persoalan banjir

masih belum maksimal dalam penanganannya. Berikut data banjir dalam sejarah :

Gambar 1 Data Banjir Jakarta

Tanggal Kejadian	2 Feb 2002	2 Feb 2007	17 Jan 2013	11 Feb 2015	1 Jan 2020	20 Feb 2021
Curah Hujan Tertinggi (mm/hari)	168	340	100	277	377	226
RW Tergenang	353	955	599	702	390	113
Luas Area Tergenang (km ²)	168	455	240	281	156	4
Area Strategis *	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Pengungsi	154.270	276.333	90.913	45.813	36.445	3.311
Jumlah Lokasi Pengungsian	N.A	N.A	1.250	409	269	44
Korban Meninggal	32	48	40	5	19	0
Waktu Surut >95% Genangan (hari)	6	10	7	7	4	Dalam penanganan

Unduh Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir
<http://bit.ly/PanduanKesiapsiagaanMenghadapiBanjirJakarta>

sumber: [instagram.com/dkijakarta](https://www.instagram.com/dkijakarta)

Dari data BPBD DKI Jakarta (2021), pada periode Joko Widodo sebagai Gubernur, terjadinya banjir besar pada tahun 2013. Dengan curah hujan yang paling rendah dibanding tahun-tahun lainnya namun memiliki jumlah paling besar lokasi pengungsian sekitar 1.250 titik dengan jumlah pengungsi 90.913 jiwa. Jika dibanding era Ahok dan Anies, pada peristiwa ini memiliki jumlah korban meninggal tertinggi yaitu 40 jiwa. Di masa periode Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi Gubernur, terjadi pula peristiwa banjir pada tahun 2015 dengan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 277 mm/hari. Hal

ini mengakibatkan jumlah wilayah RW terbanyak dan luas area yang tergenang lebih luas dibanding era Jokowi dan Anies yakni 702 RW terendam dan 281 km². Pada peristiwa banjir era Jokowi tahun 2012 dan era Ahok tahun 2013, banjir menggenangi area strategis yang berada di DKI Jakarta.

Sedangkan pada periode Anies Baswedan, peristiwa banjir juga terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, peristiwa banjir yang dialami memiliki curah hujan tertinggi dari sejarah banjir di DKI Jakarta yakni 377 mm/hari. Meskipun memiliki curah hujan tertinggi, luas area tergenang banjir lebih rendah jika dibandingkan dengan era Jokowi dan Ahok yakni hanya 156 km². Jumlah lokasi pengungsian dan korban juga mengalami penurunan yaitu 269 titik lokasi pengungsian dengan 36.445 jiwa. Lalu, jika dilihat dari data tersebut peristiwa banjir pada tahun memiliki penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua banjir yang sudah terjadi pada era Anies tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi pada area strategis wilayah DKI Jakarta.

Sebagai data tambahan dari data diatas, menurut data BPBD DKI Jakarta bahwa sekitar 53 RW dari 18 kelurahan wilayah Jakarta tergenang banjir. Berdasarkan himpunan data BNPB, banjir terparah juga terjadi pada tahun 2014 dengan total jumlah 23 jiwa yang tewas di provinsi DKI Jakarta. Warga terdampak mencapai 134.662 warga dengan 62.819 jiwa menetap sementara di 253 titik lokasi pengungsian. Peristiwa banjir pada tahun 2013 memiliki kerugian terbesar, hal ini menjadi semakin buruk disebabkan oleh adanya sejumlah tanggul jebol dan sistem drainase yang buruk. Kerugian yang ditaksir cukup fantastis, yakni mencapai Rp 20 triliun (Andika Dwi, 2022). Fenomena banjir 2020 juga banyak mengalami dampak baik adanya korban meninggal dunia serta dampak lainnya. Dari dampak tersebut, sejumlah 243 warga Jakarta mengajukan gugatan hukum untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (13/1/2020). Alasan warga melaporkan Anies yakni dinilai lalai menjalankan tugasnya seperti tidak adanya informasi dini peringatan terkait banjir di Pemprov DKI Jakarta terkhusus masyarakat kawasan bantaran kali Ciliwung (Simanjuntak, 2020).

Setiap pemimpin memiliki rencana kebijakan untuk mencapai tujuannya, sama halnya dengan para pemimpin di Jakarta. Mereka membuat setiap

kebijakan berdasarkan permasalahan yang ada seperti halnya dengan banjir. Di setiap pemimpin juga memiliki ciri khas masing-masing seperti pada masa periode Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Perbedaan yang mereka bawa tergantung pada sifat dan sikap yang ditunjukkan ke publik. Berikut tabel perbedaan penanganan banjir :

Tabel 1 Perbedaan Penanganan Banjir

Kepemimpinan	Masa Periode	Penanganan Banjir
Joko Widodo (Jokowi)	15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014	Fenomena Banjir 2013 <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta dalam masa tanggap darurat • Tahun 2014, melaksanakan upaya pencegahan dengan cara membuka pintu air Pluit • Memfokuskan penanganan kepada korban banjir Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)	19 November 2014 – 9 Mei 2017	Fenomena Banjir 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemindahan warga (relokasi) yang tinggal di bantaran sungai Pesanggrahan • Menyediakan pompa air • Memperkuat tanggul yang ada di Jakarta Utara
Anies Rasyid Baswedan (Anies)	16 Oktober 2017 – 16 Oktober 2022	Fenomena Banjir 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan 450 pompa air • Menurunkan relawan pada

		<p>daerah rawan banjir untuk sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya Pergub DKI Jakarta No 31/2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi
--	--	---

Sumber : (Meidinata, 2020)

Menurut BPBD DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan juga terdapat program penanganan banjir yang dilaksanakan yakni Project 942. Program tersebut terdiri dari pembangunan 9 polder, 4 retensi air (waduk) dan 2 naturalisasi sungai yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta (UPT PDIK BPBD Jakarta, 2021). Program ini menggabungkan beberapa konsep pengendalian banjir diantaranya konservasi air, perbaikan ekologi, dan estetika kota (viva.com, 2020). Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program Gerebek Lumpur dengan pengerukan pada kali, selokan, situ/waduk yang masih terus dilakukan di berbagai wilayah DKI Jakarta. Penerapan Blue and Green juga terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yakni taman yang dijadikan sebagai kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi (UPT PDIK BPBD Jakarta, 2021).

Jika dibandingkan dari ketiga masa kepemimpinan tersebut dalam penanganan banjir, Anies Baswedan kerap dibandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini disebabkan oleh adanya perdebatan antar konsep normalisasi ala Ahok dan konsep naturalisasi ala Anies dalam penanganan banjir (Prabowo, 2019). Proses normalisasi merupakan sebuah proses dalam mempercepat aliran air ke laut, proses ini dilakukan melalui pembuatan tanggul (beton) atau pengerukan di bantaran sungai, pelurusan sungai, atau urugan tanah. Sedangkan proses naturalisasi, sebuah proses aliran

sungai yang dibuat secara alami, proses ini dilakukan dengan cara penanaman jenis-jenis tanaman di kiri-kanan sungai atau mempertahankan sungai yang berkelok-kelok (BLI-KLHK, 2020). Selain itu, menurut pengamat politik Universitas Diponegoro, Wijayanto mengatakan pertarungan antara Ahok dan Anies yang tidak dapat dipisahkan dari Pilkada Jakarta 2017 (Bramasta, 2019)

Perbandingan juga diutarakan oleh bagian dari masyarakat, seperti Burhan (55) salah satu warga Warga RT 003 RW 006 Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu. Beliau menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Ahok hingga Gubernur Anies sudah melakukan penanganan banjir di wilayahnya. Namun jika dibandingkan antara Ahok dan Anies, beliau menilai Ahok lebih cepat dalam melakukan pencegahan seperti pengerukan Kali Pulo walaupun banjir tidak akan hilang sebaliknya Anies terlihat lamban dalam penanganan karena hanya sekedar meninjau. Lalu, Roni (41) merupakan salah satu warga RT 1 RW 7 Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. Beliau menilai Gubernur Ahok dianggap lebih berhasil dalam menangani banjir di wilayahnya. Menurutnya, aksi Ahok lebih nyata dengan pembersihan gorong-gorong, pengadaan pompa air, dan pengerukan Kali Krukut yang disaksikan oleh masyarakat, sementara Anies beliau belum bisa menilai sebab masih baru menjabat (Saputra, 2017).

Sementara Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Rahmat HS menilai bahwa penanganan banjir pada era Anies Baswedan lebih baik jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau menilai bahwa banjir di Jakarta saat ini relatif tidak terlalu parah walaupun dengan curah hujan yang ekstrim, hanya di beberapa titik Rukun Warga (RW) yang terendam banjir (Aditya, 2021). Adanya perbedaan penilaian terhadap pemimpin memang wajar di dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya kepemimpinan yang efektif serta efisien, jika dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang sudah ditetapkan. Pemimpin merupakan satu kesatuan bagian dari organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. Saat menjalankan tujuan serta fungsi kepemimpinannya, secara internal pemimpin akan melakukan aktivitasnya untuk melihat secara

jelas bagaimana menjalankan pola kepemimpinannya masing-masing (Mattayang, 2019).

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menjalankan proses kepemimpinannya, dapat dilihat sebagai identitas pemimpin baik dari segi karakter, sikap maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, persoalan kepemimpinan dalam suatu instansi pemerintah akan menentukan kualitas dan arah suatu instansi atau organisasi. Menyangkut dengan kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan masalah banjir yang sudah lama terjadi di DKI Jakarta.

Penelitian mengenai kepemimpinan seorang kepala daerah dalam menangani permasalahan daerahnya bukan menjadi hal baru pada studi politik di Indonesia. Dalam proses penyusunan penelitian ini, mengacu pada lima penelitian terdahulu yang mempunyai pembahasan yang sama mengenai kepemimpinan. Seperti penelitian karya Helmi Apriyanto pada tahun 2017 dengan judul *PERBANDINGAN GAYA KEPEMIMPINAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ALI SADIKIN (Hubungan Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta)*. Penelitian ini membahas terkait perbandingan hubungan gubernur dengan DPRD melalui analisis konflik untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kedua gubernur tersebut. Relevansinya penelitian ini adalah memiliki persamaan analisis perbandingan mengenai gaya kepemimpinan gubernur.

Penelitian selanjutnya karya Putri Nurafifah pada tahun 2017, berjudul *GAYA KEPEMIMPINAN AKTOR POLITIK (Studi Terhadap Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama Dalam Kebijakan Penggusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur Tahun 2015)*. Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan kepala daerah dalam upaya meminimalisir banjir dengan kebijakan penggusuran. Relevansi penelitian Putri Nurafifah (2017) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan teori serta objek penelitian yang sama terkait kepemimpinan dan penanganan banjir. Pembahasannya terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahannya.

Lalu penelitian selanjutnya juga membahas terkait gaya kepemimpinan karya Ahmad Nur Najmawan yakni berjudul *GAYA KEPEMIMPINAN AKTOR POLITIK (Studi Terhadap Kepemimpinan Anies Baswedan dalam Kebijakan Penataan Kawasan Tanah Abang Tahun 2018)*. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang membahas terkait gaya kepemimpinan kepala daerah dalam upaya penataan ruang kawasan Tanah Abang. Relevansi penelitian Ahmad Nur Najmawan (2018) dengan penelitian ini yaitu objek penelitian yang akan dilakukan yaitu Anies Baswedan, memberikan informasi terkait objek dalam penataan kawasan melalui gaya kepemimpinan yang dilakukannya.

Penelitian karya Mara Hasayangan dengan judul *KEPEMIMPINAN POLITIK GUBERNUR JOKOWI DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TANAH ABANG JAKARTA TAHUN 2013*. Penelitian Mara Hasayangan (2014) ini membahas terkait kepemimpinan politik Joko Widodo dalam relokasi pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang Jakarta. Relevansi penelitian Mara Hasayangan (2014) dengan penelitian ini adalah objek penelitian kepala daerah dalam menyelesaikan situasi dan persamaan dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Kemudian penelitian berjudul *PANGGUNG ANIES BASWEDAN DALAM POLEMIK BANJIR JAKARTA*. Penelitian ini, sebuah laporan akhir penilian yang dilakukan oleh Muhammad Asnan pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah mengetahui implisit pesan tersirat politik dari Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir. Relevansi penelitian ini adalah objek penelitian aktor dan permasalahan yang ingin diidentifikasi yakni Anies Baswedan serta banjir.

Selanjutnya penelitian karya Sulistyio Seti Utami yang berjudul *GAYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (GCG)*. Penelitian ini berupa jurnal dari *Jurnal Liquidity Vol. 2 No.2* tahun 2013. Penelitian Sulistyio Seti Utami (2013) ini membahas masa kepemimpinan Joko Widodo yang memiliki peran sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di dalam jurnal ini, menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana, penulis menganggap bahwa gaya

kepemimpinan yang digunakan Joko Widodo merujuk pada prinsip GCG tersebut. Relevansi dengan penelitian yang akan dibuat adalah landasan teori tentang kepemimpinan dan prinsip GCG yang dapat menjadi bahan rujukan yang baik dalam penelitian ini.

Lalu penelitian yang berjudul *GAYA KEPEMIMPINAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA PADA PEMDA DKI JAKARTA* (Survei Pada Pegawai Pemda DKI Jakarta) karya Putri Febriana Tahun 2016. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui penilaian pegawai Pemda DKI Jakarta. Relevansi terhadap penelitian ini adalah memiliki persamaan objek penelitian atau aktor kepemimpinan politik yang ingin diidentifikasi yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu penelitian dengan judul *DEMOKRASI DAN PROBLEM KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA* (Pemikiran Politik Politisi Muda: Yuddy Chrisnaudi, M. Fadjoel Rahmad, Budiman Sudjatmiko dan Fadli Zon) karya Eko Prasetyo (2013). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa problem demokrasi masa orde baru dan problem kepemimpinan yang memiliki dua pandangan. Relevansi penelitian Eko Prasetyo (2013) dengan penelitian ini yakni memiliki persamaan teori terkait kepemimpinan politik.

Penelitian selanjutnya berjudul *THE EFFECT OF BASUKI "AHOK" TJAHAYA PURNAMA LEADERSHIP STYLE ON INDONESIA DEMOCRACY (2012–2016)* karya Hendra Manurung (2016). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efek gaya kepemimpinan yang digunakan Ahok memiliki pengaruh terhadap demokrasi di Indonesia. Relevansinya dengan penelitian ini berada pada persamaan objek atau aktor yang diteliti yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terakhir, penelitian yang berjudul *A SYSTEMATIC REVIEW COMPARING URBAN FLOOD MANAGEMENT PRACTICES IN INDIA TO CHINA'S SPONGE CITY PROGRAM* karya Nawnit Kumar, dkk pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait perbandingan praktik pengelolaan banjir perkotaan yang ada di India dan China. Relevansinya penelitian ini adalah memiliki objek penelitian pembanding yang sama yakni terkait pengelolaan banjir.

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, masih terdapat celah yang belum ditemukan pada penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi celah kosong tersebut dari kajian-kajian mengenai kepala daerah khususnya perbandingan Gubernur DKI Jakarta dari Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan dalam situasi kondisi penanganan banjir yang tidak ada pada kajian atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini melihat dari segi aspek gaya kepemimpinan politik seorang pemimpin yang digunakan dalam situasi menanggapi masalah banjir serta melihat dari personalitas dari masing-masing ketiga gubernur DKI Jakarta tersebut. Dengan demikian, berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki fokus untuk mengidentifikasi bagaimana gaya kepemimpinan politik Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan banjir pada era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor diluar kendali seperti perilaku masyarakat dari penyebab terjadinya banjir di Jakarta akan terus berkembang dan hal ini akan berdampak kepada sektor yang lainnya. Apalagi fenomena banjir di Jakarta hingga sampai saat ini masih belum ditangani dengan serius oleh para pemimpinnya. Tiga Pemimpin Gubernur DKI Jakarta sudah berupaya dalam penanganan permasalahan banjir ini namun banjir masih saja tetap ada. Dari rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan politik Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan banjir pada era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

Dari jabaran latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan praktis dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi perbandingan penanganan banjir di DKI Jakarta sesuai dengan masing-masing Gaya

Kepemimpinan Politik Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan.

b. Tujuan Teoritis

Dari jabaran latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan teoritis dari penelitian ini sebagai pengembangan disiplin ilmu pada penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai gambaran kepemimpinan gubernur DKI Jakarta selanjutnya dalam penanganan banjir, serta dijadikan sumber referensi bagi pembaca dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki relasi dengan ilmu politik maupun ilmu terkait khususnya mengenai kepemimpinan kepala daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan suatu gambaran umum dan memudahkan pembahasan pada proposal penelitian ini, maka penulisan proposal penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Pada setiap bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah mengenai kepemimpinan kepala daerah dalam penanganan banjir, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab akan dikemukakan teori dan konsep yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti yakni terkait tentang kepemimpinan dan disertai dengan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memaparkan tentang metoda yang digunakan pada penelitian mulai dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian, serta pembahasan lainnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan gubernur dalam penanganan banjir di DKI Jakarta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang dirasa perlu untuk perbaikan dengan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.